

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Peran Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Potensi Desa Wisata Di Desa Bendoasri Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur

Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si ^a ; Dr. Joko Setiawan, SE, MM ^b ; Fitria, S.Sos ^c
^{a&b} Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Mojokerto
^c Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

e-mail : ^a moch.alimashuri@gmail.com, ^b awwansetyawan@gmail.com, ^c Fitria-2020@pasca.unair.ac.id

Abstrak

Peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam keberhasilan pengembangan potensi desa sebagai desa wisata. Desa wisata merupakan suatu wilayah di daerah desa yang memiliki potensi keindahan alam, kehidupan sosial dan budaya, menawarkan interaksi langsung dengan masyarakat setempat sebagai bentuk daya tarik wisata yang dapat dikembangkan sebagai objek pariwisata desa. Desa Bendoasri merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sebagai desa wisata dan desa ini telah mendapatkan binaan melalui program pengabdian masyarakat dalam mengembangkan potensi desa yang ditemukan sebagai pengembangan desa wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam meembangkan potensi desa wisata di Desa Bendoasri Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode assesment partisipatif dengan technology of Participation (ToP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat masih rendah dan belum optimal. Pemerintah desa belum sepenuhnya memiliki tindakan yang partisipatif dalam proses pelaksanaan program pengembangan desa wisata, begitu pula dengan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dikarenakan keberadaan pendapatan masyarakat yang tinggi sebagai petani porang sehingga masyarakat berada pada zona nyaman pada penghasilan pendapatan sehari-harinya.

Kata Kunci: Pemerintah Desa; Partisipasi; Desa Wisata

The Role of the Village Government and Community Participation in Developing the Potential of a Tourism Village in Bendoasri Village, Nganjuk Regency, East Java Province

Abstract

The role of the village government and community participation is an important aspect in the successful development of the village's potential as a tourism village. A tourist village is an area in a village area that has the potential for natural beauty, social and cultural life, offering direct interaction with the local community as a form of tourist attraction that can be developed as a village tourism object. Bendoasri Village is one of the villages that

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

has the potential as a tourist village and this village has received guidance through a community service program in developing the potential of the village found as a tourist village development. The purpose of this study was to determine the role of the village government and community participation in developing the potential of a tourism village in Bendoasri Village, Nganjuk Regency. This study uses a participatory assessment method with technology of Participation (ToP). The results showed that the role of village government and community participation was still low and not optimal. The village government does not yet fully have participatory actions in the process of implementing the tourism village development program, as well as community participation which is still low. This is due to the existence of high community income as porang farmers so that people are in a comfort zone in their daily income.

Keywords: Village Government; Participation; Tourist Village

A. PENDAHULUAN

Desa Bendoasri merupakan salah satu desa sasaran program pengabdian masyarakat. Desa ini terletak di kaki Gunung Pandan dengan ketinggian 490 meter di atas permukaan laut (BPS Kabupaten Nganjuk, 2020). Terletak di tengah kawasan hutan lindung dan hutan jati, desa ini memiliki banyak potensi yang meliputi potensi alam, potensi tumbuhan, potensi budaya, dan potensi sejarah. Adanya temuan benda-benda purbakala dari zaman klasik hingga Islam, seperti fosil, artefak, gerabah, menhir berbentuk kepala binatang hingga senjata berbahan logam berupa pedang, topi, dan keris, di kawasan desa tersebut merupakan bukti bahwa kawasan desa memiliki potensial sebagai situs penting ilmu pengetahuan, khususnya untuk pemahaman pengetahuan prasejarah yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata. Selain itu desa ini memiliki berbagai potensi lain seperti tradisi kebudayaan nyadran, budidaya tanaman porang hingga keindahan alam yang masih asri di wilayah desa. Hal ini merupakan sebuah peluang bagi desa dalam memanfaatkan temuan potensi yang dapat menjadikan daya tarik wisatawan. Dalam mendukung pengembangan potensi desa tersebut maka diperlukan keterlibatan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan temuan-temuan potensi tersebut sebagai objek desa wisata.

Tambunan, Sibarani, dan Asmara (2021) menyatakan bahwa untuk mewujudkan tatanan pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai dengan aspirasi dan tuntutan saat ini, diperlukan kebijakan dan pengelolaan pemerintah daerah

yang efektif, efisien dan mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki desa menuju berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk salah satunya dengan mengerahkan sumber daya pemuda desa. Selain itu, aparat pemerintah desa memiliki kewenangan pada bidang keuangan desa yang perlu dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Menurut Crisvi (2013) pemerintah daerah harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat karena secara otonom pemerintah mampu mengatur pemerintah dan keuangannya sendiri. Sebagai penggerak pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa diharapkan mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang ada di desa sehingga kekayaan yang ada di desa dapat dikelola dan diprogramkan dalam pendanaan RPJMDes dan APBDDes dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan kemandirian desa (Noviyanti, Gamaputra, Lestari, dan Utami, 2018). Artinya pemerintah daerah memiliki peran dalam mengembangkan potensi wisata daerahnya sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator (Pitana dan Tri, 2005).

Terkait Data awal dalam penelitian ini bahwa dalam proses pengumpulan data dalam program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pada bulan Juni hingga bulan Oktober 2021 salah satunya dengan menggunakan metode assesment partisipatif. Assesment partisipatif secara harfiah diartikan sebagai penggalian data dengan melibatkan masyarakat di dalamnya. Salah satu teknik penilaian partisipatif yang digunakan adalah teknologi partisipasi (ToP). Teknik ini bertujuan untuk mengeksplorasi inisiatif, sikap kepemimpinan, dan tanggung jawab para peserta

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

(Cendekia et al., 2010). Teknik ini memiliki tiga metode dasar, antara lain (1) metode diskusi; (2) metode bengkel; (3) metode perencanaan tindakan. Metode *assessment partisipatif* ini merupakan metode komprehensif untuk mengidentifikasi tindakan untuk meningkatkan keberlanjutan (Dayal et al., 2000). Penggunaan metode partisipatif ini juga memungkinkan peningkatan efektivitas suatu pemberdayaan (Jesa dan Fahmi, 2020). Dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan dapat meningkatkan kemandirian (Ramdani, 2020) dan kesadaran kolektif (Hidayat, 2018). Menurut Cendekia et al., (2010) Proses pemberdayaan partisipatif melalui *Technology of Participation* (ToP) dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Metode diskusi

Pendekatan proses diskusi didasarkan pada objektif, reflektif, interpretatif, keputusan (ORID). Tahap objektif bertujuan untuk memperoleh fakta dan data. Tahap reflektif bertujuan untuk membangkitkan respon emosional peserta terhadap masalah yang sedang dibahas. Tahap interpretatif bertujuan untuk menemukan intisari dari topik yang sedang dibahas. Tahap pengambilan keputusan bertujuan untuk memotivasi dan mengajak peserta mengambil keputusan berdasarkan hasil diskusinya.

2. Metode Workshop

Dalam metode lokakarya dilakukan tahapan konteks, brainstorming, kategorisasi, penamaan, dan refleksi. Pada tahap ini mengundang tokoh masyarakat untuk berdiskusi secara intensif. Diawali dengan penyesuaian konteks dan brainstorming. Tujuan mempersembangkannya untuk mempersiapkan pemikiran kritis yang membangun sebelum memberikan pendapatnya.

3. Metode Perencanaan Tindakan

Metode perencanaan tindakan memiliki tujuan untuk membuat rencana rinci tentang tindakan yang akan dilakukan oleh peserta. Metode ini menekankan bahwa pemberdayaan partisipatif dapat terus berlanjut hingga proses intervensi dapat dilakukan. Proses diskusi yang dilakukan pada tahap ini didasarkan pada hasil dari metode sebelumnya, dimana proses ini merupakan manifestasi dari apa yang dipikirkan dan direncanakan oleh peserta.

Selain itu, keterlibatan pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa wisata, maka pentingnya juga dalam melibatkan partisipasi masyarakat desa. Dalam proses pengembangan potensi desa wisata perlu untuk melibatkan peran serta masyarakat setempat (Irtifah dan Ghufro, 2019). Hal ini merupakan wujud kepedulian masyarakat untuk mendukung berbagai program pembangunan di bidang pariwisata (Singgalen, Sasongko, dan Wiloso, 2019). Menurut Rosyidi, Purwantini, Muliawanti, Purnomo dan Widyanto (2021) pentingnya komunikasi partisipatif didalam paradigma multiplisitas masyarakat saat ini. Salah satu kegagalan suatu program pembangunan dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa partisipasi merupakan ujung tombak dalam pembangunan desa. Sigalingging (2014) menyatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan pembangunan maka seluruh program dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena masyarakatlah yang mengetahui masalah dan kebutuhan dalam rangka mengembangkan wilayahnya dan masyarakat juga nantinya yang menggunakan dan menilai keberhasilan atau kegagalan pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu, fokus penelitian ini ingin melihat bagaimana peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi desa wisata di Desa Bendoasri Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

B. PEMBAHASAN

Pemerintah desa sebagai unsur pelaksana, perumus dan pelaksana kebijakan pemerintah desa artinya pemerintah desa memiliki tugas dalam memberikan fasilitas dan sebagai mediator bagi masyarakat desa. Peranan pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa bertujuan untuk mengembangkan suatu wilayah desa sebagai desa wisata berdasarkan apa yang dimiliki oleh desa tersebut, baik potensi kebudayaan, sejarah, hingga keindahan alam yang dimilikinya. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Bendoasri ditemukan banyaknya potensi sejarah serta alam didalam wilayah desa. Temuan benda-benda purbakala seperti fosil, artefak, gerabah, senjata yang berbahan logam berupa pedang, topi, dan keris, di kawasan desa tersebut merupakan salah satu bukti konkrit bahwa kawasan desa

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

berpotensi sebagai objek wisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai situs penting ilmu pengetahuan, khususnya untuk pemahaman pengetahuan prasejarah. Selain itu, terdapat kebudayaan nyadran yang masih dipertunjukkan setiap tahunnya di lingkungan masyarakat hingga keindahan pemandangan sunrise yang dapat dilihat di wilayah desa merupakan potensi desa wisata yang dimiliki oleh Desa Bendoasri.

Desa wisata adalah pengembangan kawasan desa yang pada dasarnya tidak mengubah apa yang sudah ada tetapi cenderung mengembangkan potensi desa yang ada dengan memanfaatkan kemampuan unsur-unsur yang ada di desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata. Tentunya dalam pengembangan desa wisata diperlukan infrastruktur pendukung sebagai daya tarik bagi wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan desa tersebut. Desa menyediakan dan memenuhi serangkaian kebutuhan wisata sebagai sarana penunjang akses menuju kawasan desa. Hal ini diperlukan dana anggaran hingga sumber daya manusia yang mendukung, dalam hal ini yaitu partisipasi seluruh elemen masyarakat desa, baik pemerintah daerah, pemerintah desa beserta perangkat desa hingga masyarakat desa dalam mencapai suatu keberhasilan program pengembangan desa wisata tersebut.

Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu pembangunan yang secara aktif dilaksanakan oleh pemerintah dalam pembangunan pariwisata sebagai leading sector agar mampu menjadi sumber devisa negara, mendorong perekonomian, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan perekonomian, memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melestarikan karakter bangsa dan nilai-nilai agama serta menjaga lapangan pekerjaan dan kualitas lingkungan. Perkembangan pengembangan obyek wisata akan mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan jika dikelola secara profesional, karena adanya peran daerah masing-masing. Peraturan tentang otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pariwisatanya sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah pasal 12 ayat 3 yang menjelaskan bahwa kepariwisataan merupakan salah satu urusan pemerintah pilihan sehingga perencanaan pengembangan kawasan wisata

dapat dimulai dengan mengidentifikasi potensi yang dimiliki daerah tersebut yang digunakan sebagai situs untuk pengembangan pariwisata yang melibatkan pemerintah desa setempat. Selain itu peranan pemerintah desa juga dapat meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dalam partisipasi pembangunan desa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, ditemukannya bahwa meskipun memiliki potensi wisata yang menarik, namun Desa Bendoasri belum bisa mengelolanya secara profesional karena peran pemerintah desa yang rendah dan belum optimal dalam memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi desanya. Selain itu, partisipasi dan kesadaran masyarakat yang rendah dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa wisata. Hal ini terlihat dari minimnya visibilitas masyarakat pada setiap tahapan pengembangan desa wisata.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Bahwa Peran Pemerintah Desa Bendoasri belum bisa mengelolanya sektor wisata (lokal wisdom tourism) secara profesional karena peran pemerintah desa yang rendah dan belum optimal dalam memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi desanya. Partisipasi Masyarakat dan kesadaran masyarakat yang rendah dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa wisata khususnya dalam Mengembangkan Potensi Desa Wisata Di Desa Bendoasri Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

Saran

Pemerintah desa dan Masyarakat seharusnya berkolaborasi dan bersinergi untuk mengekspolasi potensi desa dengan mendirikan BUMDESA sektor wisata. Hal ini karena potensi wisata desa bisa mendongkrak perekonomian desa setempat dan menumbuhkan perekonomian pasca Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia.

REFERENSI

- Cendekia, I., Sudarno, R., & Saifullah. (2010). Metode Fasilitasi Pembuatan Keputusan Partisipatif (Revisi). Jakarta timur: PATTIRO.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

- Crisvi, P. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho di Lereng Gunung Wilis. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 14.
- Dayal, R., Van Wijk, C. A., & Mukherjee, N. (2000). *Methodology for Participatory Assessments With Communities, Institutions and Policy Makers. Linking Sustainability with Demand, Gender and Poverty*. Metguide, 113.
- Hidayat, M. (2018). Pendekatan Penyuluhan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya Lokal Di Desa Kampung Baru Kecamatan Kota Agung. *Komunika*.
- Irtifah, & Ghufro, M. I. (2019). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Wisata Alam (Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Grujagan Kabupaten Bondowoso. *Media Mahardika*, 12(02), 244-253. <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/mahardika.v17i2.81>
- Jesa, B. I., & Fahmi, M. I. (2020). MENCAPAI EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MELALUI TECHNOLOGY OF PARTICIPATION (ToP): STUDI KASUS DI DESA CISAMBENG KABUPATEN MAJALENGKA. *Journal of Appropriate Technology for Community Services*, 1(2), 82-90.
- Noviyanti, Gamaputra, G., Lestari, Y., & Utami, D. A. (2018). Pengidentifikasian Pendapatan Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa. *Journal of Physical Therapy Science*, 9(1), 1-11. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>
- ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007%0Ahttps:
- Pitana, I. G., & Tri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ramdani, J. (2020). Teknik Technology of Participation (Top) Dalam Pembangunan Masyarakat Desa. *Jurnal Obor Penmas*, 3(1), 223-231.
- Rosyidi, M. I., Purwantini, A. H., Muliawanti, L., Purnomo, B. C., & Widyanto, A. (2021). Communication Participation in Community Empowerment for Energy Independent Tourism Villages in the Pandemic Era. *E3S Web of Conferences*, 232(79), 1-7. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123201036>
- Sigalingging, A. H. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2(Desember 2014), 118. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jpt.65505>
- Singgalen, Y. A., Sasongko, G., & Wiloso, P. G. (2019). Community Participation in Regional Tourism Development: A Case Study in North Halmahera Regency - Indonesia. *Insights into Regional Development*, 1(4), 318-333. [https://doi.org/10.9770/ird.2019.1.4\(3\)](https://doi.org/10.9770/ird.2019.1.4(3))
- Tambunan, A. A., Sibarani, R., & Asmara, S. (2021). The Role of Youth in the Development of Cultural Tourism in Tipang Village, Baktiraja District, Humbang Hasundutan Regency. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 144-152. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1544>